

ABSTRAK

Kekayaan alam Indonesia berupa perairan yang sangat luas hingga potensi didalamnya berupa kekayaan ekosistem perairan baik kekayaan flora maupun fauna didalamnya menimbulkan ancaman terjadinya tindak pidana *illegal fishing*. Penanggulangan kejahatan tersebut dilakukan melalui 2 (dua) upaya yakni upaya penal dan upaya non penal, yaitu. Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Dan Aplikasi, yakni melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Dengan payung hukum yang baru diharapkan terciptanya kordinasi yang kuat antar institusi yang memiliki kewenangan penegakan hukum diranah perikanan demi tercapainya cita-cita negara poros maritim dunia dan terciptanya perlindungan untuk ekosistem kekayan air Indonesia, serta perlindungan untuk nelayan-nelayan Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan untuk melindungi kawasan perairan Indonesia agar tidak di eksploitasi oleh nelayan negara lain karena kekayaan Indonesia harus di manfaatkan untuk seluruhnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia memberikan negara lain karena kekayaan Indonesia harus di manfaatkan untuk seluruhnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam aturan yang mengatur kewenangan diberikan kepada penyidik yaitu Kejaksaan, Kepolisian, TNI AL, Bakamla, Kementrian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan penenggelaman/pembakaran kapal yang berbendera asing yang didasarkan atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*). Hasil penulisan ini menjelaskan bahwa Penenggelaman/pembakaran kapal berbendera asing oleh Penyidik didasarkan atas putusan inkrah pengadilan, ditujukan dalam rangka menjaga kedaulatan perairan Indonesia, serta bentuk perlindungan atas hak-hak nelayan Indonesia agar bisa secara maksimal memanfaatkan kekayaan perairan Indonesia tanpa gangguan nelayan asing serta potensi perikanan yang seharusnya dinikmati oleh para nelayan Indonesia tidak diambil oleh nelayan asing dengan cara *illegal fishing* maka dengan penegakan hukum melalui kebijakan penenggelaman/pembakaran kapal-kapal asing yang terbukti melakukan *illegal fishing* menjadi langkah yang tepat guna menunjukan supremasi kedualatan bangsa Indonesia atas wilayahnya dan kekayaan perairannya tidakan ini harus dilakukan untuk memeberikan rasa jera kepada para pelaku *illegal fishing* tentunya dengan proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan yang cermat tegas dan terukur.

Kata Kunci : Jaksa; Penenggelaman Kapal, Pembakaran Kapal; *Illegal fishing*.

ABSTRACT

Indonesia's natural wealth in the form of very wide waters so that the potential in it in the form of a wealth of aquatic ecosystems, both the wealth of flora and fauna in it poses a threat of illegal fishing. The crime prevention is carried out through 2 (two) efforts, namely penal efforts and non-penal efforts, namely: With the enactment of Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries, and other related laws and regulations. And Application, namely through the process of investigation, investigation, prosecution, and court. With the new legal umbrella, it is hoped that there will be strong coordination between institutions that have the authority to enforce law in the field of fisheries in order to achieve the ideals of the world maritime axis state and create protection for Indonesia's water rich ecosystems, as well as protection for Indonesian fishermen who depend on the fishery sector for their livelihood. to protect Indonesian waters from being exploited by fishermen from other countries because Indonesia's wealth must be fully utilized for the prosperity and welfare of the Indonesian people, giving other countries because Indonesia's wealth must be fully utilized for the prosperity and welfare of the Indonesian people. In the rules governing the authority given to investigators, namely Prosecutors, Police, Military, Bakamla, Ministry of Marine Affairs and Fisheries to sink/burn foreign-flagged vessels based on court decisions with permanent legal force as regulated in Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries. This research is a normative legal research with the Statute Approach, Case Approach and Conceptual Approach. The results of this paper explain that the sinking/burning of a foreign-flagged ship by investigators is based on a court decision, aimed at safeguarding the sovereignty of Indonesian waters.

Key Word : Jaksa; Ship sinking, Ship burning; Illegal fishing.